



## **PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PEREMPUAN DI KABUPATEN KARAWANG**

**Agung Adi Laksono, Lukmanul Hakim, Rachmat Ramdani**

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa Karawang

### **Abstrak**

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti memilih menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif untuk menemukan cara, mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hasil penelitian tersebut. Pentingnya peran perempuan dalam pembangunan SDGs (Sustainable Development Goals) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen dunia untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan, karenanya pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Penelitian ini berkaitan erat dengan kinerja lembaga pemerintahan, yang berdampak konstruktif pada pengembangan kajian ilmu pemerintahan. Dalam pemberdayaan sumber daya perempuan, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan perempuan, salah satunya adalah Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). pelaksanaan program terpadu P2WKSS Kabupaten Karawang Tahun 2022 juga dicanangkan untuk ikut penilaian provinsi Jawa Barat. Hal itu dilakukan karena optimisme pemda terhadap Desa Tirtasari yang dianggap memiliki potensi untuk konsisten dalam pelaksanaan program P2WKSS, selain itu Desa Tirtasari juga dianggap memiliki banyak kegiatan penunjang di tingkat masyarakat yang sudah berjalan sangat baik seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PKK. Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program P2WKSS ini, yakni kurang dilibatkannya perempuan itu sendiri sebagai pengelola program P2WKS, keterlibatan mereka masih sebatas kelompok penerima (objek) dan tidak terlibat sebagai pengelola program. Permasalahan lain muncul dari pelaksana program yang tidak menjalankan programnya sesuai rencana, akibatnya terjadi keterlambatan pelaksanaan, padahal tahun ini ada target pemerintah yang harus dikejar yakni penilaian P2WKSS dari provinsi, selain itu program P2WKSS juga menunjuk daerah atau wilayah yang dianggap kurang menonjol dari segi pemberdayaan perempuan. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sumberdaya organisasi dalam Implementasi Program Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Tirtasari Kabupaten Karawang.

---

\*Correspondence Address : [agungadilaksono@gmail.com](mailto:agungadilaksono@gmail.com)

DOI : 10.31604/jips.v10i3.2023.1370-1376

© 2023UM-Tapsel Press

**Kata Kunci:** Pemberdayaan Perempuan, Program (P2WKSS), Sumberdaya Perempuan.

## **PENDAHULUAN**

Perempuan memiliki peran penting dalam menciptakan Keluarga yang sehat dan sejahtera. Salah satunya peran dan partisipasi dalam program pemberdayaan sebagai upaya mencapai kesetaraan, kesederajatan dan keadilan dalam kehidupan rumah tangga.

Pemberdayaan merupakan upaya yang dilakukan oleh masyarakat, dengan atau tanpa dukungan pihak luar, untuk memperbaiki kehidupannya yang berbasis kepada daya mereka sendiri, melalui optimasi daya serta peningkatan posisi tawar yang dimiliki. (Mardikanto & Soebiato, 2013). Sejatinya sebuah pemberdayaan adalah bertujuan untuk membuat seseorang mampu melakukan sesuatu secara mandiri tanpa harus tergantung pada orang lain. Kemandirian yang ada sebagai hasil dari sebuah pemberdayaan dalam bentuk kemandirian ekonomi, kemandirian politik dan sebagainya tergantung kepada jenis program yang ada. Pemberdayaan sebagai suatu kegiatan yang membuat orang dapat melakukan perubahan dalam dirinya dengan melalui sebuah proses yang dapat berlangsung secara singkat atau pun melalui sebuah proses yang panjang.

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dalam proses kebijakan publik. Dimana fungsi dan tujuan implementasi ialah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran-sasaran kebijakan publik dapat diwujudkan sebagai "outcome" (hasil

akhir) dari kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Implementasi dapat disebut sebagai "policy delivery system". Maksudnya, sebagai suatu sistem penyampaian/penerusan kebijakan (Tachjan, 2006). Dengan demikian implementasi kebijakan merupakan tahapan yang bersifat praktis, karenanya perlu ada tingkat keseriusan yang ditinggi disertai pengawasan yang intens agar pelaksanaan sesuai dengan harapan dari kemunculan kebijakan itu.

Mendidik masyarakat (termasuk perempuan) dalam meningkatkan kapasitas dikembangkan melalui berbagai cara berdasarkan kebutuhan masyarakat. Pelatihan berbasis masyarakat merupakan salah satu model pengembangan untuk merangsang pemahaman, peran dan keterampilan masyarakat. Pelatihan masyarakat dalam berbagai program pembangunan merupakan upaya transfer of knowledge dan memberikan sejumlah pengalaman baru yang bermanfaat bagi pengembangan peran dan memecahkan permasalahan yang dihadapi. (Sumpeno, 2009)

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera di Daerah, dijelaskan juga bahwa P2WKSS dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu: Program Dasar, Program Lanjutan Dan Program Pendukung. Dalam program dasar yang sebagaimana dimaksud ialah meliputi pengumpulan data dasar dari

masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS, penyusunan Rencana Kerja Kelompok, kegiatan penyuluhan, percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pemberantasan buta aksara dan pendidikan karakter dan pekerti bangsa. Program Lanjutan meliputi pelayanan dan pendampingan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Program Pendukung meliputi pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkelanjutan dan tindak lanjut seluruh aktivitas kelompok kegiatan.

Program P2WKSS telah tersebar diberbagai daerah di Indonesia dan telah menjadi program yang dijalankan setiap tahunnya.

**Tabel 1. Daftar Desa Sasaran P2WKSS Kabupaten Karawang**

| No | Tahun | Desa/Kelurahan      | Kecamatan                |
|----|-------|---------------------|--------------------------|
| 1  | 2018  | Desa Mekarbuana     | Kecamatan Tegalwaru      |
| 2  | 2019  | Kelurahan Mekarjati | Kecamatan Karawang Barat |
| 3  | 2020  | Desa Mulyajati      | Kecamatan Ciampel        |
| 4  | 2021  | Desa Puspasari      | Kecamatan Pedes          |
| 5  | 2022  | Desa Tirtasari      | Kecamatan Tirtamulya     |

Sumber : Arsip P2WKSS Kabupaten Karawang 2021

Menyadari pentingnya peran perempuan dalam pembangunan SDGs (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan komitmen dunia untuk memprioritaskan pemberdayaan perempuan, karenanya pemerintah Indonesia membidik empat sektor utama yakni di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta terkait pencegahan kekerasan. Hal tersebut sejalan dengan fungsi pemerintah dalam aspek pemberdayaan, menurut Paul dalam (Sari, 2013) fungsi pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable sharing of power*) sehingga

meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap “proses dan hasil-hasil pembangunan”.

Maka untuk mendukung wacana tersebut, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberdayakan perempuan, salah satunya adalah Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2009 tentang pedoman pelaksanaan program P2WKSS dijelaskan bahwa Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia khusus pada perempuan untuk dapat lebih berperan dan lebih memiliki kapabilitas terutama dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera.

Program (P2WKSS) menjadi salah satu upaya dalam pengembangan sumber daya manusia serta pengembangan keluarga sehat sejahtera dan Bahagia untuk pembangunan masyarakat desa/kelurahan dengan perempuan sebagai penggerakannya. Program ini masuk dalam program kerja Departemen/LPND. Beberapa departemen dan Lembaga non-departemen yang menangani program Peningkatan Peranan Wanita (P2W) dalam pembangunan sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masingnya, serta peran aktif dalam Gerakan PKK dengan partisipasi Lembaga swasta dan LSM lainnya.

**Tabel 1. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Desa Tirtasari**

| Desa      | Jumlah Penduduk | Kepadatan Penduduk (per km <sup>2</sup> ) | Jumlah Dusun |
|-----------|-----------------|---|--------------|
| Tirtasari | 4.554           | 1.339                                     | 7            |

Sumber : Tirtamulya dalam Angka (2021)

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat terdapat 4.554 penduduk yang ada di Desa Tirtasari dari luas wilayah sebesar 1.652 km<sup>2</sup> dengan jumlah dusun sebanyak tujuh.

Pelaksanaan program terpadu P2WKSS Kabupaten Karawang Tahun 2022 juga dicanangkan untuk ikut penilaian provinsi Jawa Barat. Hal itu dilakukan karena optimisme pemda terhadap Desa Tirtasari yang dianggap memiliki potensi untuk konsisten dalam pelaksanaan program P2WKSS, selain itu Desa Tirtasari juga dianggap memiliki banyak kegiatan penunjang di tingkat masyarakat yang sudah berjalan sangat baik seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kegiatan rutinanan yang dilakukan oleh PKK.

Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program P2WKSS ini, yakni kurang dilibatkannya perempuan itu sendiri sebagai pengelola program P2WKS, keterlibatan mereka masih sebatas kelompok penerima (objek) dan tidak terlibat sebagai pengelola program. Permasalahan lain muncul dari pelaksana program yang tidak menjalankan programnya sesuai rencana, akibatnya terjadi keterlambatan pelaksanaan, padahal tahun ini ada target pemerintah yang harus dikejar yakni penilaian P2WKSS dari provinsi, selain itu program P2WKSS juga menunjuk daerah atau wilyah yang dianggap kurang menonjol dari segi pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu, penelitian tertarik untuk memilih Desa Tirtasari menjadi lokus penelitian, karena lokasinya yang secara geografis terbilang jauh dari pusat kota, maka peneliti juga ingin mengetahui sejauh mana konsistensi Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan kegiatan Program P2WKSS Di Desa Tirtasari.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam kehidupan sosial ekonomi khususnya unit keluarga, perempuan akan selalu terkait baik

sebagai perseorangan maupun sebagai komunitas karena perempuan memiliki peranan penting dalam mengelola kebutuhan domestik (Martiany, 2015), bahkan menurut IFAD (the international fund for agricultur development) (2011) beberapa tahun ini potensi pemberdayaan perempuan dari

*microfinance* telah dicanangkan semakin luas, dengan perempuan sebagai aktor utamanya. Motivasinya adalah keinginan untuk melibatkan perempuan dalam proses pembangunan agar dapat mencapai hasil pembangunan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Stigmatisasi yang sering muncul di tengah masyarakat Indonesia dengan budaya patriarkinya kerap kali menempatkan perempuan berada di posisi terendah. Salah satu upaya untuk menghilangkan stigma itu adalah dengan pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan perempuan merupakan upaya untuk memberdayakan diri dengan memiliki kemampuan atau keterampilan sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki oleh perempuan. Dengan adanya pemberdayaan perempuan ini akan membantu perempuan dalam menangani permasalahan yang terjadi khususnya kaitan dengan isu gender.

Perempuan yang produktif bekerja dapat memberikan kontribusi ekonomi pada rumah tangga dan memiliki peluang meningkatkan kesejahteraan keluarga atau rumah tangga. Pemanfaatan Sumberdaya perempuan secara optimal dapat meningkatkan keadilan gender dan pemberdayaan perempuan. Hal tersebut sesuai dengan poin MDG's (millennium development goals)tahun 2000. Cukup banyak program pembangunan dan pemberdayaan gender yang telah direncanakan oleh pemerintah, tetapi belum begitu signifikan hasilnya (Mustar, 2007).

Pada Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Pedoman

Pelaksanaan Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera di Daerah, dijelaskan juga bahwa P2WKSS dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu: Program Dasar, Program Lanjutan Dan Program Pendukung. Dalam program dasar yang sebagaimana dimaksud ialah meliputi pengumpulan data dasar dari masing-masing sektor yang terkait dalam kegiatan P2WKSS, penyusunan Rencana Kerja Kelompok, kegiatan penyuluhan, percepatan penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun dan pemberantasan buta aksara dan pendidikan karakter dan pekerti bangsa. Program Lanjutan meliputi pelayanan dan pendampingan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Program Pendukung meliputi pemantauan dan evaluasi kegiatan yang berkelanjutan dan tindak lanjut seluruh aktivitas kelompok kegiatan.

Tujuan dari pemberdayaan perempuan sangatlah kompleks, salah satunya adalah meningkatkan aspek kesejahteraan, peran dan partisipasi. Hal tersebut tergantung dari jumlah pelatihan yang dilaksanakan dan sesuai kebutuhan. Ditemukan keberagaman kesadaran kritis yang diakibatkan pandangan responden belum sepenuhnya terbuka terhadap kesetaraan gender sehingga pengaruh konstruksi gender dan lingkungan masih berdampak pada responden. Persepsi pemenuhan kebutuhan pokok keluarga responden secara disadari menjadi tanggungjawab responden. (Goso & Adi, 2018)

Adapun Implementasi Kebijakan dapat diukur dengan beberapa indikator seperti yang disampaikan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli dalam Subarsono (2019:101) :

1. Kondisi lingkungan
2. Hubungan antar organisasi
3. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

4. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana  
Sasaran dari Pelaksanaan Program Terpadu P2WKSS adalah :

- a) Perempuan dengan tingkat kesejahteraan tergolong rendah dan/atau yang masuk dalam kategori keluarga miskin, Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera Tahap I, dan menurut hasil pendataan Badan Pusat Statistik (BPS).
- b) Jangkauan Program Terpadu P2WKSS meliputi kelurahan dengan prioritas rawan sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan.
- c) Lokasi Jangkauan Program Terpadu P2WKSS ditetapkan oleh Wali Kota/Bupati berdasarkan atas asas kemandirian atau keswadayaan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang menjadi penanggungjawab kebijakan P2WKSS yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan desa melalui program-program yang membangun, oleh karena itu penulis akan mengkaji sejauh mana komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dalam melaksanakan program P2WKSS Tahun 2022 di Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya yang ditetapkan sebagai sasaran dari pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Karawang dalam menjalankan kebijakan Program Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Tirtasari Kecamatan Tirtamulya dapat berjalan optimal apabila memperhatikan tahapan implementasi sebagaimana

teori yang disampaikan oleh G. Shabbir Cheema dan Dennis A Rondinelli dalam Subarsono (2019:101) :

- 1) Kondisi lingkungan
- 2) Hubungan antar organisasi
- 3) Sumberdaya organisasi
- 4) Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana.

## **SIMPULAN**

Peran Perempuan dalam menciptakan kesejahteraan dalam keluarga cukup kompleks. Dibutuhkan pengembangan sumber daya perempuan yang mempunyai demi menciptakan keluarga yang sehat dan sejahtera. Mengenai pemberdayaan dan partisipasi perempuan tidak lepas pula dengan pemerintah daerah. Pemerintah memiliki peran penting dalam melakukan pemberdayaan sumber daya perempuan, terkhususnya Pemerintah Daerah.

Program terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) adalah salah satu upaya pemerintah melalui program yang ditujukan bagi peningkatan sumber daya manusia khusus pada perempuan untuk dapat lebih berperan dan lebih memiliki kapabilitas terutama dalam mewujudkan keluarga sehat sejahtera.

Berdasarkan Rapat Koordinasi P2WKSS pada awal tahun 2022, pemerintah daerah Kabupaten Karawang melalui Bappeda merumuskan fokus pelaksanaan P2WKSS pada pembangunan fisik dan non-fisik. Pembangunan fisik adalah prioritas pembangunan di sektor kesehatan, yakni PAUD, Posyandu dan Puskesmas karena pusat kesehatan di Desa Tirtasari terbilang minim. Kemudian pembangunan non-fisik diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia untuk melaksanakan pelatihan dan pembinaan dari SKPD yang bertugas, dimana fokus pembinaan itu diprioritaskan dalam beberapa sektor diantaranya:

- 1) Sektor Keagamaan,
- 2) Sektor Kesehatan,
- 3) Sektor Pendidikan,
- 4) Sektor Perindustrian dan Perdagangan,
- 5) Sektor Koperasi dan UMKM,
- 6) Sektor Sosial,
- 7) Sektor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan terhadap perempuan dan anak,
- 8) Sektor Ketahanan Pangan,
- 9) Sektor Narkotika,
- 10) Sektor PKK,
- 11) Sektor KB dan Kesehatan Reproduksi (Hayatullah, 2022).

Selanjutnya, pelaksanaan program terpadu P2WKSS Kabupaten Karawang Tahun 2022 juga dicanangkan untuk ikut penilaian provinsi Jawa Barat. Hal itu dilakukan karena optimisme pemda terhadap Desa Tirtasari yang dianggap memiliki potensi untuk konsisten dalam pelaksanaan program P2WKSS, selain itu Desa Tirtasari juga dianggap memiliki banyak kegiatan penunjang di tingkat masyarakat yang sudah berjalan sangat baik seperti Kelompok Wanita Tani (KWT) dan kegiatan rutin yang dilakukan oleh PKK. Namun terdapat kelemahan dalam pelaksanaan program P2WKSS ini, yakni kurang dilibatkannya perempuan itu sendiri sebagai pengelola program P2WKS, keterlibatan mereka masih sebatas kelompok penerima (objek) dan tidak terlibat sebagai pengelola program. Permasalahan lain muncul dari pelaksana program yang tidak menjalankan programnya sesuai rencana, akibatnya terjadi keterlambatan pelaksanaan, padahal tahun ini ada target pemerintah yang harus dikejar yakni penilaian P2WKSS dari provinsi, selain itu program P2WKSS juga menunjuk daerah atau wilayah yang dianggap kurang menonjol dari segi pemberdayaan perempuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arifin, Imamul dan Giana Hadi W. Membawa Cakrawala Ekonomi. Jakarta: PT. SetiaPurna.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : AIPI Bandung.
- Esmara, H. 1986. Sumber Daya Manusia, Kesempatan Kerja Dan Perkembangan Ekonomi. Jakarta: UI Press.
- Hariyoso, S. 2002. Pembaruan Birokrasi dan Kebijakan Publik. Yogyakarta : Peradaban.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2006. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Mantra, Ida Bagus. 1985. Pengantar Studi Demografi. Yogyakarta: Nur Cahya.
- Martiany, D. (2015). Corporate Social Responsibility : Konsep, Strategi dan Implementasinya. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI.
- Moleong, J Lexy. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Purwanto dan Sulistya. 2012. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gaya Media.
- Inne, H., Stiawati, T., & Indriyany, I. A. (2019). Evaluasi Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Kabupaten Serang Tahun 2017. International Journal of Demos, 54 - 77.
- Martiany, D. (2015). Corporate Social Responsibility : Konsep, Strategi dan Implementasinya. Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR RI.
- Mardikanto, T.& Soebiato, P. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik.(Bandung: Alfabeta.) h. 100
- Rejbiani, A. G., Azijah, D. N., & Hakim, L. (2021). Implementasi Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) di Desa Sukadaya Kabupaten Bekasi. Jurnal Penelitian Administrasi Publik, 15 - 24.
- Sanparta, Goso & Adil (2018). PENGARUH DAN PERAN PEREMPUAN KEPALA KELUARGA DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP KONTRIBUSI PEREKONOMIAN KELUARGA.
- Sari, A. L. (2013). FUNGSI PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN LINGGA (STUDI PADA KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DI KECAMATAN LINGGA. Jurnal Universitas Medan Area.
- Setyaningrum, D. A., & Rahaju, T. (2019). Evaluasi Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Dan Sejahtera (P2WKSS) Di Desa Badang Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang (Studi Pada Sektor Ketahanan Pangan). Jurnal Publika Unesa, 1-8.
- Sumpeno, 2009. Sumpeno, Wahyudin. 2009. Sekolah Masyarakat Penerapan Rapid Training Design Dalam Pelatihan Berbasis Masyarakat. Yogyakarta: Pustaka Pelajar)h.46.
- Ulfah. (2010). Efikasi Diri Mahasiswa yang Bekerja pada Saat Penyusunan Skripsi. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.